

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Etika Politik

Secara *etimologi* etika politik memiliki dua kata utama yaitu etika dan politik pertama kita akan membahas etika, etika memiliki arti dasar kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat secara umum dan menjadi adat istiadat yang meliputi perasaan, batin dan kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan dan tata krama yang disandarkan kepada baik buruknya suatu perilaku, yang di mana kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos*. Jika mengacu pada *terminologi* yang didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah nilai yang menyangkut tentang benar dan salah yang diyakini oleh suatu golongan atau masyarakat.¹ Kedua Politik Secara etimologi, kata politik diambil dari bahasa latin *politicus* atau dalam bahasa Yunani *politicos* yang bermakna *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut sendiri berasal dari kata "*polis*" yang bermakna "kota".²

Sejarawan sekaligus filsuf dari barat Bertarnd Russel dalam jurnal yang ditulis oleh Pérez-Jara dan Camprub menjabarkan bahwasanya Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat memulai perkembangannya di Yunani ketika struktur politik tradisional mulai mengalami keambrokan. Saat itu, muncul pertanyaan yang mendasar tentang bagaimana seharusnya masyarakat diatur dan diorganisir. Dalam sejarah perkembangannya, etika politik mengalami peningkatan momentumnya sekitar empat ratus tahun yang lalu. Pada masa itu, *legitimasi* kekuasaan raja dalam tatanan *hierarkis kosmos* tidak lagi diterima begitu saja. *Legitimasi-legitimasi* tradisional yang sebelumnya memiliki daya ikat terhadap kekuasaan mulai melemah. Bahkan, *legitimasi* tatanan hukum dan negara, serta hak raja untuk memerintah masyarakat juga dipertanyakan. Situasi inilah yang menjadi pemicu bangkitnya filsafat politik pada awal zaman industrialisasi. Klaim-klaim legitimasi

¹ M Muchtarom and others, *Dinamika Etika Politik di Indonesia - Jejak Pustaka* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 54-55.

² Sulaeman, *Politik Identitas: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern* (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2022), 26.

kekuasaan yang saling bertentangan menuntut adanya refleksi filosofis terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan politik.³

Munculnya kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis seperti: Apa yang membuat sebuah pemerintahan layak dan memiliki otoritas Bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan politik Apa tanggung jawab politik terhadap kesejahteraan Masyarakat Perkembangan etika politik menjadi sangat penting karena harus memberikan landasan moral yang dapat membantu merumuskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam kehidupan politik. Bertarnd Russel menganggap etika politik berperan penting dalam mendorong pemikiran kritis dan refleksi filosofis terhadap tindakan politik dan kebijakan publik.Selain itu, etika politik juga memainkan peranan penting dalam membangun argumen-argumen moral yang kuat untuk melawan penindasan, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks kehidupan politik. Etika politik mendorong individu untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan perubahan positif dalam sistem politik yang ada. Etika politik lahir sebagai respons terhadap keambrukan struktur politik tradisional dan berkembang pesat pada awal zaman industrialisasi. Refleksi filosofis atas klaim-klaim legitimasi kekuasaan yang saling bertentangan memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang prinsip-prinsip dasar kehidupan politik. Etika politik memiliki peranan penting dalam merumuskan landasan moral untuk kehidupan politik, mendorong pemikiran kritis, dan memperjuangkan keadilan sosial.⁴

Wayne Morrison menjabarkan pemikiran Hegel Yurisprudensi: dari Rousseau Ke Hegel Lahirnya Tradisi Hukum *Ekspresif* dan Impian Kehidupan Etis Hukum, bahwasanya fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada menyediakan alat-alat teoretis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Etika politik berupaya untuk memahami dan mengevaluasi tindakan politik dengan menggunakan pendekatan yang rasional,

³ Pérez-Jara and Camprub, *Science and Apocalypse in Bertrand Russell: A Cultural Sociology* (86-90 Paul Street, London EC2A 4NE: Lexington Books, 2022), 142-146.

⁴ Thohir and Sahidin, *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 163-166. <<https://books.google.co.id/books?id=un37DwAAQBAJ>>.

objektif, dan *argumentatif*. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang berdasarkan emosi, prasangka, atau *apriori*. Dalam konteks ini, etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis dengan menetapkan apa yang harus dilakukan seseorang. Etika politik tidak memiliki wewenang langsung untuk mengarahkan tindakan politik individu atau mengambil keputusan politik konkret. Sebagai gantinya, etika politik menyediakan kerangka berpikir dan kriteria evaluasi yang dapat membantu individu maupun masyarakat untuk memeriksa dan memahami legitimasi tindakan politik.⁵

Williams, dalam karyanya *Hegel on the Proofs and Personhood of God: Studies in Hegel's Logic and Philosophy of Religion* Hegel juga meyakini Etika politik dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis, mengeksplorasi landasan rasional dari kebijakan politik, menilai dampak kebijakan tersebut terhadap nilai-nilai dan norma-norma moral, dan mengajukan argumen-argumen yang memperkuat atau menentang tindakan politik tertentu. Etika politik juga memainkan peran penting dalam membentuk dan membentuk norma-norma masyarakat terkait pemerintahan dan kebijakan, serta dalam mempromosikan pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik.⁶

Thohir and Sahidin, *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis* menjabarkan Pandangan Bruno Bauer salah seorang yang meneruskan dan mengembangkan pemikiran Hegel Etika politik memiliki tugas tanggung jawab yang membantu memastikan bahwa pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dilakukan secara objektif. Ini berarti bahwa argumen-argumen yang diajukan haruslah dipahami dan dapat ditanggapi oleh semua pihak yang memahami permasalahan tersebut. Meskipun etika politik tidak memiliki kekuatan untuk mengkhotbah para politikus dan memaksa mereka untuk bertindak sesuai dengan norma-norma moral tertentu, namun etika politik dapat memberikan pedoman atau patokan orientasi bagi mereka yang benar-benar ingin menilai kualitas tatanan

⁵ Wayne Morrison, *Yurisprudensi: dari Rousseau Ke Hegel Lahirnya Tradisi Hukum Ekspresif dan Impian Kehidupan Etis Hukum* (Bantul: Nusamedia, 2021), 72.
<<https://books.google.co.id/books?id=2TJxEAAAQBAJ>>.

⁶ Williams, *Hegel on the Proofs and Personhood of God: Studies in Hegel's Logic and Philosophy of Religion* (Oxford: Oxford University Press, 2017), 141.
<<https://books.google.co.id/books?id=92bODQAAQBAJ>>.

politik dan kehidupan politik dengan menggunakan tolok ukur martabat manusia.⁷ Dalam konteks ini, etika politik berperan sebagai alat bantu yang membantu dalam mengartikulasikan nilai-nilai dan norma-norma moral yang relevan dalam konteks politik. Etika politik mengajukan pertanyaan etis yang penting, misalnya tentang keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kebaikan bersama, serta mengajukan argumen-argumen yang mendukung atau menentang tindakan politik tertentu berdasarkan nilai-nilai ini.

Pemahaman Bruno Bauer tentang peran etika politik berdasarkan pandangan Hegel dalam jurnal berjudul *The Political Theology and Polemical Tactics of Bruno Bauer* karya Kumi Miysell dan Joko Wasisto, memberikan patokan moral bagi para politikus dan warga negara dalam mengevaluasi tindakan-tindakan politik. Etika politik mengarahkan mereka untuk mempertimbangkan implikasi etis dari kebijakan politik yang diambil, seperti dampaknya terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, etika politik berkontribusi dalam membantu menciptakan tatanan politik yang lebih baik dan lebih manusiawi. Selain itu, etika politik juga dapat memberikan argumen-argumen moral yang kuat untuk advokasi dan perubahan sosial yang lebih baik. Etika politik dapat melibatkan masyarakat dalam refleksi kritis tentang nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan menginspirasi mereka untuk berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif dalam sistem politik yang ada.⁸

Dampak dari etika politik adalah sebagai sebuah realitas dalam kehidupan masyarakat yang tidak membiarkan berbagai klaim kekuasaan menjadi begitu saja mapan. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan politik dipaksa untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan mereka berdasarkan prinsip-prinsip moral dasar yang adil dan bermartabat. Secara keseluruhan, etika politik memiliki peran penting dalam mengubah cara kita melihat dan memahami

⁷ Thohir and Sahidin, *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlmn. 187-191. <<https://books.google.co.id/books?id=un37DwAAQBAJ>>.

⁸ Kumi Miysell dan Joko Wasisto, "The Political Theology and Polemical Tactics of Bruno Bauer," *European Legacy* 00, no. 00 (2020): 1-23, <https://doi.org/10.1080/10848770.2023.2275879>.

kekuasaan politik serta memberikan dasar moral yang kuat untuk mengevaluasi tindakan politik. Etika politik mendorong keterbukaan, refleksi kritis, dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penguasa atas tindakan mereka demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan berkeadilan.⁹

Al-Farabi, seorang filosof muslim terkenal pada abad ke-9, menjalankan penyatuan filsafat Aristoteles dan Neo-Platonisme dengan ajaran-ajaran keislaman yang berlandaskan pada pemahaman spiritual dan idealis. Dalam upayanya untuk menggabungkan kedua tradisi ini, Al-Farabi menemukan inspirasi dalam konsep politik dari pandangan para tokoh tersebut. Dia mengambil logika dan pemikiran filsuf dari Aristoteles, yang mengajarkan pentingnya rasionalitas dan metode ilmiah dalam memahami alam semesta yang pada akhirnya dia menemukan pandangan etika politik.¹⁰

Penentuan syarat pemimpin menurut Al-Farabi terdapat unsur utama yaitu manusia yang paling sempurna, Al-Farabi menggabungkan dua aspek yang saling berkaitan yaitu *Fitrah* dan *Tabiat*, serta talenta *Malakah* dan kehendak *Iradah*. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki 12 karakteristik yang penting seperti apa yang tertuang dalam karyanya *Al-Madinah Al-Fadilah* sebagai berikut:

احدها ان يكون تام الاعضاء، قواها مؤتية اعضائها على الاعمال التي شأنها ان تكون بها،

Artinya: Seorang pemimpin harus memiliki anggota badan yang sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh yang kuat dan sehat akan mendukung kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya dengan baik¹¹

⁹ Williams, *Hegel on the Proofs and Personhood of God: Studies in Hegel's Logic and Philosophy of Religion* (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlmn. 167.

¹⁰ R Aizid, *Para Pelopor Kebangkitan Islam* (Yogyakarta: Divapress, 2018), 53.

¹¹ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 118.

و متى هم بعضو ما من اعضائه عملاً يكون به فأتى عليه بسهولة ثم ان يكون بالطبع جيد الفهم والتصور لكل ما يقال له، فيلقاه بفهمه على ما يقصده القائل،

Artinya: Seorang pemimpin juga harus memiliki pemahaman yang baik dan daya hafalan yang kuat. Kecerdasan dan kemampuan mengingat yang baik akan memungkinkan seorang pemimpin untuk memahami situasi yang kompleks dan membuat keputusan yang tepat.¹²

و على حسب الأمر في نفسه ثم ان يكون جيد الحفظ لما يفهمه وما يراه وما يسمعه وما يدركه،

Artinya: Intelktualitas yang tinggi menjadi syarat penting bagi seorang pemimpin. Kemampuan berpikir kritis, analitis, dan memiliki wawasan yang luas akan membantu pemimpin dalam merumuskan kebijakan yang efektif.¹³

وفي الجملة لا يكاد ينساه ثم أن يكون جيد القطنة، ذكياً، اذا رأى الشيء بأدنى دليل فطن له على الجهة التي دل عليها الدليل ثم أن يكون حسن العبارة،

Artinya: Seorang pemimpin harus pandai dalam mengemukakan pendapat dan menjelaskannya secara jelas sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Kemampuan komunikasi yang baik akan mempermudah dalam membangun hubungan yang harmonis dengan bawahan dan masyarakat¹⁴

يؤاتية لسانه على ابانة كل ما يضمه ابانة تامة ثم أن يكون محباً للتعليم والاستفادة منقاداً له، سهل القبول، لا يؤلمه تعب التعليم، ولا يؤذيه

¹² Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 118.

¹³ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 118.

¹⁴ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 118.

الكذ الذي ينال منه ثم ان يكون غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح،

Artinya: Pemimpin harus memiliki rasa cinta terhadap pendidikan karena pendidikan merupakan kunci dalam membangun suatu kebudayaan yang menghasilkan suatu peradaban, untuk mencapai suatu peradaban yang baik maka diperlukan pendidikan yang membentuk karakter pola pikir dan perilaku manusia.¹⁵

متجنباً بالطبع للعب، مبعضاً للذات الكائنة عن هذه ثم أن يكون محبا للصدق واهله، مبغضاً للكتب واهله.

Artinya: Seorang pemimpin harus tidak tamak dalam hal-hal yang bersifat materi. Pemimpin yang tidak tergoda oleh kekayaan dan kepentingan pribadi akan lebih mampu mengemban tugasnya dengan adil dan berkeadilan¹⁶

ثم أن يكون كبير النفس، محبا للكرامة تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور.

Artinya: Seorang pemimpin harus mencintai kebenaran. Kejujuran dan integritas adalah nilai penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar mereka dapat dipercaya oleh rakyatnya.¹⁷

وتسمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منها ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر اعراض الدنيا هيئة عنده. ثم أن يكون بالطبع محبا للعدل واهله،

Artinya: Seorang pemimpin harus berjiwa besar. Sikap rendah hati dan kemurahan hati akan membantu seorang pemimpin untuk mengayomi dan memimpin dengan

¹⁵ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 118.

¹⁶ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 119.

¹⁷ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 119.

bijaksana¹⁸

ومبعضا للجور والظلم وأهلهم، يعطي النصف من أهله ومن غيره
وبحث عليه، ويؤني من حل به الجور موانيا لكل ما يراه حسنا وحميلاً،

Artinya: Seorang pemimpin tidak boleh terlalu memandang penting kekayaan dan kesenangan dunia. Fokus pada tujuan yang lebih besar dan kepentingan publik akan membuat pemimpin tidak tergoda oleh godaan-godaan materi.¹⁹

ثم أن يكون عدلاً غير صعب القياد، ولا جموحاً ولا لجوجاً اذا دعي
الى العدل،

Artinya: Seorang pemimpin harus mencintai keadilan dan membenci keburukan. Sikap adil dan tegas terhadap pelanggaran hukum dan ketidakadilan akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.²⁰

بل صعب القياد اذا دعى إلى الجور وإلى القبيح واجتماع هذه كلها في
انسان واحد عسر؛

Artinya: Seorang pemimpin harus tanggap dan tidak sulit diajak untuk menegakkan keadilan. Responsif terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat akan membantu pemimpin untuk secara efektif menjalankan tugasnya.²¹

فلذلك لا يوجد من فطر على هذه القطرة

Artinya: Seorang pemimpin harus memiliki pendirian yang kuat atau istiqomah. Konsistensi dalam prinsip dan nilai-nilai yang dianut.²²

¹⁸ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 119.

¹⁹ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 119.

²⁰ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 119.

²¹ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 119.

²² Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 119.

Ridwan selaku salah satu akademisi muslim yang memiliki fokus fiqh politik menjelaskan bahwa etika politik Islam dapat didefinisikan dengan menggunakan terminologi *Siyasah Syar'iyah*. Menurut Ridwan, *Siyasah Syar'iyah* adalah konsep politik yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Konsep ini menekankan pentingnya mengacu pada sumber-sumber Islam sebagai panduan dalam bertindak di ranah politik. Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa *Siyasah Syar'iyah* merupakan politik yang dihasilkan oleh pemikiran manusia berdasarkan etika, agama, dan moral. Hal ini berarti bahwa keputusan politik haruslah dibangun di atas dasar prinsip-prinsip Islam yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Serta memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat yang diajarkan dalam Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kebajikan, dan kesejahteraan sosial. Politik yang berlandaskan *Siyasah Syar'iyah* bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip Islam.²³

Etika politik Islam memiliki tujuan yang mendalam, yaitu mengarahkan manusia menuju kehidupan yang lebih baik, berdampingan dengan orang lain, dan memperluas kebebasan serta membangun institusi-institusi yang adil. Etika politik Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan akhlak Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Para pakar filsafat agama dan pemikiran politik di dunia Islam sepakat bahwa etika politik Islam merupakan suatu konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan akhlak dengan ajaran-ajaran agama Islam, yang kemudian diimplementasikan dalam domain politik untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Dalam pandangan Islam, etika politik juga ditekankan sebagai sarana untuk mencapai politik yang bersih, sebagai landasan untuk mencapai kesuksesan politik yang berkelanjutan.²⁴

2. Politik Islam

Kamus-kamus bahasa Arab Modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata siyasah. Kata ini terambil dari kata

²³Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 183.

²⁴Kamma and others, *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 67.

kerja atau *fi'il*; *sāsa-yasusu* (سَاسَ – يَسُوسُ) yang biasanya diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya.²⁵ Gagasan politik yang terdapat didalam karya-karya yang dihasilkan oleh Al-Farabi menimbulkan perdebatan panjang khususnya dikalangan akademisi dan orang-orang yang mendalami bidang politik. ini tidak terlepas dari gagasan awal Al-Farabi yang dipengaruhi oleh beberapa filsuf Yunani, sehingga muncul beberapa paradigma di mana Al-Farabi dicap sebagai penjiplak dari Plato dan Aristoteles. Disisi lain Al-Farabi sendiri mengakui bahwasanya ide dan gagasannya itu banyak dipengaruhi oleh Plato dan Aristoteles tetapi ketika kita memahami lebih mendalam tentang apa yang digagas melalui karya-karya yang ciptakan oleh Al-Farabi itu banyak nilai-nilai spiritual yang khususnya dipengaruhi oleh Islam.²⁶ Maka dari itu kita akan membahas bagaimana Al-Farabi selaku guru kedua memandang politik Islam.

Pertama paradigma *integralistik* adalah suatu pandangan yang sama persis dengan negara teokrasi dalam Islam. Paradigma ini menganggap agama dan negara sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam pandangan ini, agama dan negara merupakan dua lembaga yang saling menyatu, sehingga tidak dapat dipisahkan. Paradigma integralistik juga menegaskan bahwa negara bukan hanya sekadar lembaga politik, tetapi juga merupakan lembaga agama.²⁷ Dalam hal ini, negara berperan dalam menyebarkan ajaran agama, menjaga keberagaman agama, dan memastikan penerapan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan Masyarakat dan dapat dikatakan juga bahwasanya paradigma integralistik ini merupakan bagaimana peran negara dalam *mempromogandakan* nilai agama terhadap masyarakat secara massif dan memiliki legalitas.

Sistem ini juga menekankan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau negara. Dengan demikian, dalam pandangan *integralistik*, nilai-nilai agama, termasuk hukum-hukum Islam, harus menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan negara. Namun, perlu diingat

²⁵ Sulaeman, *Politik Identitas: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern* (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2022), 27.

²⁶ Muthhar, *The Ideal State* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 124-125.

²⁷ Rasyid, Anugrah, and Yuniarti, *Peta Ideologi Ummat Islam Pada Sistem Demokrasi di Indonesia: Penelitian Pada Beberapa Pesantren di Pulau Jawa* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 24-25.

bahwa pandangan ini kontroversial dan memiliki beragam tafsir dan interpretasi. Sementara beberapa orang meyakini pentingnya integrasi agama dan negara berdasarkan keyakinan secara utuh terhadap ajaran agama. Islam sendiri memiliki golongan yang menerapkan pandangan ini, Dimana kebanyakan orang yang meyakini paradigma *integralistik* ini adalah golongan Syi'ah dan beberapa golongan sunni *konservativ* yang didalamnya cenderung *eksklusif* dalam memahami ajaran agama islam.²⁸

Dinamika Islam dan negara modern, terdapat suatu pola hubungan yang *integratif* yang melahirkan konsep tentang agama-negara. Konsep ini mengacu pada pengaturan kehidupan kenegaraan dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dalam konteks ini, paradigma *integralistik* sering kali dikaitkan dengan paham *Ad-Din Wa Dawlah* (Islam sebagai agama dan negara), di mana sumber hukum positifnya adalah hukum Islam atau syariat Islam.²⁹ Paradigma *integralistik* ini diadopsi oleh beberapa negara seperti Negara Kerajaan Saudi Arabia dan penganut Syi'ah di Iran. Di kalangan penganut Syi'ah, istilah *Imamah* digunakan untuk mengacu pada konsep dawlah yang sering kali dirujuk oleh kalangan Sunni. Penting untuk dicatat bahwa paradigma ini juga dapat menimbulkan perdebatan dan keragaman tafsir dalam hal cara mengintegrasikan agama dan negara.

Beberapa menyambut ide ini sebagai cara untuk menjaga kesucian nilai-nilai agama dalam kehidupan publik, sementara yang lain berpendapat bahwa pemisahan antara agama dan negara lebih sesuai untuk menjaga kebebasan beragama dan keadilan bagi semua warga negara. Hasan Al-Bana, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha, dan Al-Maududi berpendapat bahwa agama dan politik tidak boleh dipisahkan. Mereka meyakini bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, termasuk dalam hal sistem politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya mengadopsi sistem politik yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan tidak mengikuti model politik Barat. Mereka juga menganggap bahwa sistem politik yang harus dijadikan contoh

²⁸ Muthhar, *The Ideal State* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 126-127.

²⁹ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik* (Jakarta: Kencana, 2018), 60.

adalah yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad dan empat Khalifah Rasyidin.³⁰

Pemikir Islam yang memiliki keyakinan tentang agama dan negara yang satu atau integrated yang di mana melahirkan suatu teori yang bernama *Islam Din Wa Al-Daulah* memiliki landasan surah Al-Baqarah ayat 107.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ ١٠٧

Artinya: “Tidaklah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah.”³¹

Berdasarkan ayat tersebut al-Maududi meyakini bahwa antara negara dan agama tidak bisa dipisahkan yang kemudian al-Madudi memiliki gagasan *al-Hakimiyah al-Ilahiyah*. Maududi berpendapat bahwa *al-Hakimiyah al-Ilahiyah* merupakan inti dari ajaran Islam, yang mengharuskan pemimpin dan sistem pemerintahan mengikuti hukum-hukum Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Menurut Maududi dalam karya Muhammad Iqbal berjudul *Pemikiran Politik Islam*, tujuan negara Islam adalah untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam pandangan Maududi, negara Islam harus membentuk sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid (keyakinan akan keesaan Allah) dan menjunjung tinggi kedaulatan Allah. Kekuasaan politik harus ditempatkan pada tangan individu yang memahami ajaran Islam secara baik dan mampu menerapkannya dalam praktik. Maududi juga menekankan pentingnya partisipasi publik dan keterlibatan umat Islam dalam proses pembentukan negara Islam.³²

Kedua paradigma *Simbiotik*, antara negara dan agama mengacu pada hubungan erat antara kedua *entitas* tersebut dalam konteks sosial dan politik. Paradigma ini mendasarkan pada keyakinan bahwa negara dan agama saling bergantung dan

³⁰ Hamzani, Aravik, and Khasanah, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran* (Pekalongan: NEM, 2021), 57..

³¹ Q.S Al-Baqarah: 107

³² Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 170-171.

saling mempengaruhi untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan adil. Dalam paradigma *simbiotik* ini, negara dianggap sebagai *entitas* yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan keamanan publik, sementara agama memegang peranan penting dalam mengatur nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Negara dan agama dipandang sebagai mitra yang saling melengkapi dan bekerja bersama untuk menciptakan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama dan moral. Dalam paradigma ini, negara tidak hanya sekadar menjalankan tugas administratif dan politik, tetapi juga mengakui peran agama dalam menginspirasi kebijakan publik dan mengatur perilaku masyarakat. Sebaliknya, agama juga diharapkan untuk menghormati kerangka hukum dan institusi negara serta membantu menciptakan harmoni dan stabilitas dalam masyarakat.³³

Mohammad Asy'ari muthhar berpendapat melalui bukunya *The Ideal State* perspektif Al-Farabi tentang konsep negara ideal bahwasanya ada tiga tokoh berpengaruh yang pertama ada tokoh pembaharu dari India atau yang lebih kita kenal sebagai pembentuk negara Pakistan yaitu Moh Iqbal kemudian ada Muhammad Abduh dan Ibnu Khaldun. Sementara Wahab, dalam karyanya *Islam Radikal dan dan Moderat Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia* mengemukakan pandangan Husein Haikal salah satu cendekiawan yang berasal dari Mesir bahwa dasar prinsip yang dijalankan dalam tatanan sosial sudah tertera di dalam Alquran dan as-sunnah yang di mana memiliki korelasi dengan sistem pemerintahan tetapi hanya sebatas *value* dan prinsip serta sistem politik untuk secara eksplisit Husein Haikal menyatakan selama tidak ada hal-hal yang mengarah kemudaratn maka sistem apapun itu boleh digunakan selama tidak melanggar nilai-nilai yang tertanam dalam agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut memunculkan nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental demokrasi yang pertama ada kesetaraan *equality*, persaudaraan *brotherhood* dan kebebasan *freedom*.³⁴

Haikal dalam jurnal *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran* karya hamzani, Aravik, dan Khasanah menyatakan bahwa Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan yang

³³ M Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2022), 29-31.

³⁴ Wahab, *Islam Radikal dan Moderat Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 214-215.

harus diikuti oleh umat, mengandung ide bahwa Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih sistem pemerintahan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan zaman. Haikal juga menyatakan bahwa untuk memahami sistem pemerintahan Islam, kita harus merujuk kepada prinsip-prinsip utama yang telah ditetapkan dan menjadi landasan kehidupan manusia dalam agama Islam. Prinsip-prinsip ini termasuk keadilan, keseimbangan, transparansi, partisipasi publik, dan kebebasan individu. Dalam perspektif Haikal, tidak ada keraguan bahwa Islam dan demokrasi memiliki kesesuaian dalam hal-hal *esensial*. Haikal juga menekankan bahwa Islam bersandar pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi publik, keadilan, dan kebebasan individu. Dalam pandangannya, demokrasi dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks ini, paradigma simbiotik antara Islam dan demokrasi dapat dikembangkan. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adil, partisipatif, dan menghormati hak asasi manusia.³⁵

Ketiga paradigma *Sekularistik* dalam pandangan paradigma ini, beracu kepada *al-Dunya al-Akhirat*, *al-Din-al-Daulah*, *Umur al-Dunya- Umur al-Akhirat* yang cenderung *dikotomiskan* secara *diametral*. Paradigma *sekuleristik* adalah pandangan yang memisahkan agama dari urusan politik dan mengedepankan pemisahan antara institusi keagamaan dan negara. Dalam paradigma sekuleristik, *al-Dunya al-Akhirat* (kehidupan dunia dan kehidupan akhirat) dianggap sebagai dua hal yang terpisah dan bahkan bertentangan. Kehidupan dunia dipandang sebagai ranah yang terbatas pada urusan dunia material, sementara kehidupan akhirat dilihat sebagai urusan spiritual dan keagamaan yang terpisah dari realitas dunia.³⁶

Al-Din-al-Daulah (agama dan negara) juga sering *dikotomikan* secara *diametral* dalam pandangan *sekuleristik*. Dalam pandangan ini, agama dipandang sebagai urusan pribadi masing-masing individu dan tidak memiliki tempat dalam urusan publik seperti politik atau pemerintahan. Negara, di sisi lain, dianggap sebagai lembaga yang harus bersifat netral dalam

³⁵ Hamzani, Aravik, and Khasanah, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran* (Pekalongan: NEM, 2021), 67.

³⁶ Muthhar, *The Ideal State* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 128-129.

hal agama dan tidak boleh campur tangan dalam urusan keagamaan. Selain itu, paradigma *sekuleristik* cenderung menekankan pada umur *al-Dunya* (usia dunia) lebih daripada umur *al-Akhirat* (usia akhirat).³⁷ Fokus utamanya adalah pada kehidupan dunia saat ini dan pencapaian kesuksesan material, dan kurang memperhatikan persiapan untuk kehidupan akhirat.

Pandangan *sekuleristik* ini, kesucian dan nilai-nilai spiritual sering diabaikan atau *direduksi* menjadi aspek pribadi yang terpisah dari urusan publik. Agama dipandang sebagai sesuatu yang harus dikurangi peran dan pengaruhnya, dan tidak harus menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan atau institusi negara. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini merupakan salah satu pendekatan dalam dunia pemikiran sekuleristik, dan terdapat variasi dalam hal bagaimana *al-Dunya al-Akhirat*, *al-Din-al-Daulah*, *Umur al-Dunya- Umur al-Akhirat* dipersepsikan dalam paradigma *sekuleristik*. Pandangan ini tidak dapat mewakili seluruh *spektrum* pemikiran *sekuleristik*.

Negara yang menganut paham *sekuler* menurut Tahah Husain didalam tulisan Muthhar berjudul *The Ideal State* menjabarkan tentang perbedaan tatanan melalui gambaran garis *vertical* dan *horizontal*, yang pada akhirnya akan memberikan output terhadap bagaiman system negara dan sosial berjalan sebagaimana mestinya. Garis *vertical* jika di kontekstualisasikan akan melahirkan hukum yang akan mengatur bagaimana menjaga tatanan sosial atau hidup bernegara seringkali umat muslim menyebutnya dengan *Habluminannas*. Sementara untuk garis *horizontal* merupakan hubungan antara individu terhadap tuhanya dimana umat muslim sering menyebutnya dengan *Habluminallah* yang dalam cakupanya akan melahirkan moralitas dan etika. Sementara pandangan Ali Abdul Raziq di dalam, *The Ideal State* karya Muthhar, menganggap Islam tak lebih dari sebtas agama dimana didalamnya tidak memiliki kaitanya dengan urusan negara.³⁸

Soleh menjabarkan dalam *Epistemologi Islam: Integrasi Agama, Filsafat, dan Sains Dalam Perspektif Al-Farabi dan Ibnu Rusyd* Al-Farabi menganggap agama sebagai penjaga etika

³⁷ Rasyid, Anugrah, and Yuniarti, *Peta Ideologi Ummat Islam Pada Sistem Demokrasi di Indonesia: Penelitian Pada Beberapa Pesantren di Pulau Jawa* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 28-30.

³⁸ Muthhar, *The Ideal State* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 130.

dan moralitas dalam negara. Pemimpin ideal untuk sebuah negara yang sempurna, yang disebut *Al-Madinah Al-Fadhilah*, harus menjadi seorang nabi atau filsuf, meskipun tidak ada kriteria pasti yang ditetapkan oleh Al-Farabi. Jika tidak ada individu yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan tersebut, Al-Farabi berpendapat bahwa negara dapat dipimpin oleh beberapa orang secara kolektif. Selain itu, Al-Farabi menyatakan bahwa sebuah negara yang baik adalah negara di mana penduduknya dapat bekerja sama dalam pembagian kerja yang proporsional. Ia menggunakan perumpamaan tubuh manusia untuk menggambarkan kehidupan dalam negara. Setiap individu memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda namun saling melengkapi satu sama lain.³⁹ Seperti yang tertuang dalam kitabnya yaitu *Al-Madinah Al-Fadhilah* sebagai berikut:

والمدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح، الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة الحيوان، وعلى حفظها عليه وكما أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى، وفيها عضو واحد رئيس وهو القلب، وأعضاؤه ١٣٥ تقرب مراتبها من ذلك الرئيس، وكل واحد منها جعلت فيه بالطبع قوة يفعل بها فعله ابتغاء لما هو بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس وأعضاء آخر فيها قوى تفعل أفعالها على حسب أغراض هذه التي ليس بينها وبين الرئيس واسطة فهذه في الرتبة الثانية وأعضاء آخر تفعل الأفعال على حسب غرض هؤلاء الذين في هذه المرتبة الثانية، ثم هكذا إلى أن تنتهي إلى أعضاء تخدم ولا ترؤس أصلاً وكذلك المدينة أجزاؤها مختلفة الفطرة، متفاضلة الهيئات. وفيها إنسان هو رئيس، وآخر يقرب مراتبها من الرئيس وفي كل واحد منها هيئة ومملكة يفعل بها فعلاً يقتضي به ما هو مقصود ذلك الرئيس وهؤلاء هم أولو المراتب الأول.

³⁹ Soleh, *Epistemologi Islam: Integrasi Agama, Filsafat, dan Sains Dalam Perspektif Al-Farabi dan Ibnu Rusyd* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), 234-236.

ودون هؤلاء قوم يفعلون الافعال على حسب اغراض هؤلاء ثم هكذا
تترتب اجزاء المدينة الى ان تنتهي إلى آخر يفعلون افعالهم على حسب
اغراضهم، فيكون هؤلاء هم الذين يخدمون ولا يخدمون ويكونون في
انثالمراتب، ويكونون هم الأسفلين ١٣٦

Artinya: “Kota utama menyerupai tubuh sempurna yang sehat, yang seluruh anggota tubuhnya saling membantu menyempurnakan dan merawat kehidupan bewan. Sebagaimana anggota-anggota tubuh yang fitrah dan potensinya berbeda- beda, dan di dalamnya terdapat satu anggota tubuh yang utama, yakni jantung. Juga anggota-anggota yang derajatnya dekat dengan anggota yang utama itu, dan masing-masing anggota tubuh itu mempunyai potensi tertentu secara alami yang mengerjakan tugasnya dengan potensi itu, thenuju sesuatu yang secara alami adalah tujuan anggota yang utama itu, juga anggota-anggota lain dengan potensi- potensinya yang melakukan tugasnya sesuai tujuan anggota-anggota ini yang antara anggota-anggota ini dengan anggota utama tidak ada perantara anggota-anggota uin Ini menempati urutan kedua, juga anggota-anggota lain yang melakukan tugas sesuai tujuan anggota-anggota urutan kedua. Demikian seterusnya sampai pada anggota-anggota yang melayani dan tidak memimpin sama sekali. Demikian juga kota. Warganya berbeda-beda fitrahnya, berbeda-beda kondisinya. Di dalamnya terdapat seorang manusia yang menjadi pemimpin, yang lainnya punya derajat yang dekat dengan sang pemimpin. Masing-masing warganya punya kondisi dan bakat tertentu yang melakukan tugas sesuai tujuan sang pemimpin. Mereka ini menempati urutan pertama. Di bawah mereka terdapat kaum yang melakukan tugas sesuai Lujuan mereka di urutan pertama. Demikian seterusnya urutan warga kota sampai pada kaum yang melakukan tugasnya sesuai tujuan mereka. Mereka adalah orang yang melayani dan tidak dilayani. Mereka berada di urutan terbawah

dan terendah.⁴⁰

Effendi menganggap Al-Farabi tidak secara *eksplisit* menyebutkan bahwa negara harus berbentuk Islam. Ia lebih fokus pada gagasan bahwa negara yang baik adalah negara yang masyarakatnya sejahtera karena dipimpin oleh pemimpin yang bijak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Al-Farabi termasuk dalam *paradigma simbiotik* di mana agama berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga moralitas masyarakat tanpa harus menjadi bagian formal dari struktur negara. hubungan antara teologi dan politik yang pada zaman itu jarang dibicarakan. Karya-karya tersebut mencerminkan pengaruh Plato dalam Republik yang diilustrasikan sebagai sebuah kota *uthopia*. Dalam risalah tersebut, peran teologi jauh lebih dominan daripada peran politik, bahkan menggesernya. Hal ini dapat terlihat ketika Al-Farabi membahas konsep pertama yang terkait dengan persoalan-persoalan *Neo-Platonis*. Dari 37 pasal dalam risalah tersebut, hanya 12 pasal yang secara benar-benar membahas tentang politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setidaknya Al-Farabi lebih menekankan aspek teologi daripada politik dalam karyanya.⁴¹

3. Partai Politik

Partai politik secara terminologi adalah suatu kelompok atau kupulan yang terdiri dari beberapa *individu* yang terorganisir dan anggota- anggotnya mempunyai semangat untu mewujudkan nilai-nilai dan cita-cita yang telah dikehendaki secara *kolektif*.⁴² Periode akhir abad ke-18 di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, aktivitas politik terpusat pada kelompok-kelompok politik di parlemen. Awalnya, kegiatan ini dilakukan oleh kelompok elit dan aristokrat, yang memperjuangkan kepentingan bangsawan terhadap tuntutan raja. Namun, dengan semakin meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga mulai berkembang di luar parlemen dengan adanya panitia pemilihan yang bertugas mengorganisir dukungan

⁴⁰ Abu Nasr al-Farabi. *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 118-119.

⁴¹ Effendi, *Filsafat Kebahagiaan: Plato, Aristoteles, Al-Ghazali, Al-Farabi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 87-88.

⁴² Fauzanto, *Wajah Korupsi di Indonesia (Himpunan Artikel Ilmiah-Populer Terangkai)* (Penerbit Widina, 2023).

pendukung menjelang pemilihan umum kadang-kadang disebut (*Caucus Party*). Karena pentingnya mendapatkan dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen mulai mengembangkan organisasi massa. Akibatnya, pada akhir abad ke-19, partai politik mulai muncul sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Partai politik menjadi saluran komunikasi antara rakyat dan pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.⁴³

Perkembangan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah tidak terlepas dari perluasan konsep demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses politik. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memberikan pendapat, memilih pemimpin, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik. Partai politik menjadi wadah bagi individu-individu dengan visi politik yang serupa untuk bergabung, mengorganisir, dan mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Partai politik ini berperan dalam menyediakan alternatif pemimpin dan agenda politik kepada publik, sehingga rakyat dapat secara efektif mengungkapkan preferensinya melalui pemilihan umum.⁴⁴

Berkembangnya sistem partai politik, partai politik juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat ke dalam proses politik formal, seperti melalui parlemen atau lembaga legislatif. Partai politik ini menciptakan platform politik, menghasilkan kebijakan publik, dan membantu menjembatani hubungan antara pemerintah dan rakyat. Selain itu, partai politik juga relevan dalam mengedukasi masyarakat tentang isu-isu politik dan sosial, serta memobilisasi massa dalam aksi politik seperti kampanye pemilihan dan demonstrasi. Melalui partai politik, rakyat dapat menjadi bagian dari suatu gerakan atau kelompok yang memiliki visi dan misi politik yang sama.⁴⁵

⁴³ Isharyanto, *Partai Politik, Ideologi dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Absolute Media, 2017), 4.

⁴⁴ Budiatri and others, *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 2.

⁴⁵ Toni Andrianus Pito, Efriza, and Kemal Fasyah, *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2022), 37.

Beberapa pemikir politik didalam karya Toni Andrianus Pito, Efriza, and Kemal Fasyah, mengenai Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi berpendapat bahwa dalam demokrasi, representasi partai politik adalah salah satu prasyarat penting. Demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang menghubungkan dan mengendalikan masyarakat melalui keputusan kolektif mengenai masalah-masalah publik. Dalam hal ini, institusi publik harus mampu secara efektif menerima dan mengakomodasi harapan serta kepentingan rakyat. Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu mekanisme demokrasi yang diyakini oleh banyak pihak sebagai alat untuk secara damai menggabungkan beragam kepentingan warga negara.⁴⁶

Partai politik, sebagai lembaga *representatif* dalam sistem demokrasi, memiliki peran penting dalam hal ini. Mereka mewakili kepentingan konstituen mereka dan bertindak sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik berfungsi sebagai wadah bagi individu-individu dengan visi politik yang serupa untuk mengorganisir dan menyampaikan aspirasi serta kepentingan masyarakat.⁴⁷ Melalui pemilihan umum, partai politik menyediakan alternatif pemimpin dan agenda politik kepada publik. Dengan demikian, partai politik memungkinkan rakyat untuk secara efektif menyatakan preferensi mereka dan memengaruhi jalannya proses politik.

Partai politik memiliki peran penting dalam sistem kepartaian yang ada. Setiap partai beroperasi dalam kerangka kepartaian yang berlaku di suatu negara. Partai-partai ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga berinteraksi dengan partai lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem kepartaian ini mencerminkan struktur persaingan antara partai politik dalam upaya untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem kepartaian memiliki beberapa manfaat. Pertama, sistem ini meningkatkan stabilitas politik.⁴⁸ Dalam konteks persaingan antarpolitical, partai akan cenderung bekerja keras untuk memenangkan dukungan dari pemilih. Hal ini

⁴⁶ Toni Andrianus Pito, Efriza, and Kemal Fasyah, *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2022), 38

⁴⁷ Isharyanto, *Partai Politik, Ideologi Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Absolute Media, 2017), 7.

⁴⁸ Muhlin Lalongan., dan Rahmawati., *Partisipasi Politik Masyarakat : Teori dan Praktik*, 1 (Makasar: Sah Media, 2016), 152.

mendorong partai untuk mengembangkan program dan agenda politik yang lebih baik, sehingga memberikan stabilitas pada proses politik yang ada. Selain itu, sistem kepartaian juga meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Demokrasi memberikan ruang terhadap partai politik untuk memenangkan pemilu dan akan membentuk pemerintahan serta berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya partai politik yang terorganisir, pembuatan kebijakan dapat dilakukan melalui proses yang lebih disiplin dan melibatkan perspektif yang beragam. Namun, meskipun sistem kepartaian memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas politik dan *efektivitas* pemerintahan, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, sistem kepartaian dapat memicu polarisasi politik dan meningkatkan persaingan yang tidak sehat antarpol. Selain itu, sistem kepartaian juga dapat menjadi kendala dalam menjalankan representasi yang efektif, kenyataannya paradigma ini sering kali terpecah. Partai politik sering kali dianggap sebagai masalah dalam upaya meningkatkan demokratisasi, bukan sebagai solusi.⁴⁹

Problematika diatas dapat disebabkan dari beberapa faktor: Pertama, partai politik sering kali terjebak dalam siklus politik yang korup dan tidak transparan. Praktek-praktek seperti politik uang, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan seringkali terjadi dalam lingkup parpol. Ini menghasilkan citra negatif tentang partai politik di mata masyarakat. Kedua, partai politik sering kali memiliki kepentingan yang jauh dari kepentingan masyarakat. Banyak partai politik yang lebih fokus pada kepentingan kelompok tertentu atau elit politik, daripada pada pelayanan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan mereduksi peran mereka sebagai representasi yang *efektif*. Ketiga, partai politik seringkali mengalami fragmentasi dan perpecahan internal. Perbedaan pandangan dan ambisi antar anggota partai seringkali menghasilkan perpecahan yang merugikan partai dan mengurangi kepercayaan publik terhadap

⁴⁹ Budiatri and others, *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*(Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 42.

mereka. Ini juga bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan menghambat proses pengambilan keputusan yang *efektif*.⁵⁰

Munculnya Budi Utomo sebagai perkumpulan kaum terpelajar merupakan cikal bakal terbentuknya partai politik di Indonesia. Perkumpulan ini awalnya berfokus pada studi, aspek sosial ekonomi, dan pendidikan. Namun, setelah Budi Utomo didirikan, muncul dua organisasi lain yang juga dianggap sebagai partai politik pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam dan *Indische Partij*. Kehadiran Sarekat Islam dan Indische Partij menjadi ancaman bagi Budi Utomo, karena banyak anggota Budi Utomo yang beralih bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal ini mencerminkan perubahan politik dan kepentingan yang lebih besar dalam masyarakat pada saat itu. Meskipun demikian, Budi Utomo dan perkumpulannya tetap berperan penting dalam pergerakan nasional Indonesia dan menyumbangkan gagasan-gagasan yang relevan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan negara.⁵¹

Partai-partai politik mulai muncul karena adanya iklim kebebasan yang luas, setelah berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda. Kebebasan ini memberikan kesempatan terbuka kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik. Munculnya partai politik sebenarnya telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia dan menjadi cikal bakal Indonesia sebagai negara demokrasi. Partai politik yang lahir selama masa penjajahan merupakan hasil dari gerakan-gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kebebasan yang lebih luas dari penjajah serta menuntut kemerdekaan. Melalui lahirnya partai-partai tersebut, masyarakat Indonesia berusaha untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka dalam mencapai kemerdekaan.⁵²

Masa Demokrasi Terpimpin di era kepemimpinan Soekarno tahun 1959, tidak ada ruang bagi keberagaman pendapat dalam menghadapi isu-isu politik penting khususnya partai yang beririsan islam. Sistem tersebut menuntut adanya

⁵⁰ Kumi Miysell dan Joko Wasisto, “Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Teori Partai Politik,” *Jurnal Prodi Ilmu Politik* 1, no. 2 (2020): 81–92, <https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13710>.

⁵¹ Kumi Miysell dan Joko Wasisto, “Disrupsi Politik,” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>.

⁵² Syafii Maarif, *Percaturan Islam dan Politik* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 34.

satu komando politik yang mengatur semua keputusan politik. Akibatnya, partai-partai Islam pada saat itu tidak memiliki opsi lain selain menyesuaikan diri dengan sistem dan tata politik yang baru dibentuk. Hal ini dilakukan terutama untuk tetap bertahan hidup di bawah sistem politik yang otoriter pada masa itu. Meskipun partai-partai Islam pada periode tersebut memiliki kelemahan politik, upaya mereka dalam memperjuangkan kewajiban pendidikan agama melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) untuk semua jenjang sekolah negeri adalah suatu perjuangan yang penting dan strategis. Proses Islamisasi di Indonesia yang bergerak dengan cepat dari segi jumlah menjadi lebih mendalam pada periode pasca kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari kontribusi yang diberikan oleh partai-partai Islam tersebut.⁵³

Polarisasi partai politik di Indonesia semakin kompleks ketika memasuki pemilu kedua pada tahun 1971 saat Indonesia berada di bawah kepemimpinan Soeharto dalam periode Orde Baru. Meskipun pada pemilu tahun 1955 terdapat empat macam pola partai yang berhasil menang, pada tahun 1971 situasi politik mengarah pada hanya terdapat 9 kontestan pemilihan dan dimenangkan oleh Golkar. Setelah itu, dari pemilu tahun 1977 hingga akhir periode Orde Baru pada tahun 1997, Indonesia hanya memiliki 3 partai politik utama, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Polarisasi klasik antara Syarikat Islam dan Syarikat Rakyat masih ada, namun dipengaruhi oleh dominasi Golkar sebagai partai mayoritas tunggal. Selama masa Orde Baru ini, kampanye anti-kiri dan anti-kanan terus-menerus dilakukan. Hal ini mencerminkan *atmosfer* politik yang didominasi oleh kebijakan pemerintah yang menentang ekstremisme politik baik dari kiri maupun kanan.⁵⁴

Mundurnya Soeharto, Indonesia mengalami munculnya berbagai partai politik yang menjadi wadah aspirasi rakyat. Namun pada pemilihan umum tahun 1999, hanya ada lima partai yang berhasil memperoleh mayoritas suara dari total 48 partai peserta. Dua di antaranya adalah partai baru, yaitu PKB dan PAN, sementara tiga lainnya merupakan warisan dari Orde Baru, yakni PDI-P, Golkar, dan PPP. Polarisasi klasik yang ada

⁵³ Syafii Maarif, *Percaturan Islam dan Politik* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 21-23.

⁵⁴ Fautanu, Rahman, and Mubarak, *Partai Politik di Indonesia* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 2.

pada masa Orde Lama juga kembali muncul, dengan PKB mewakili NU (Nahdlatul Ulama) dan PAN mewakili Masyumi. Kemudian, pada periode berikutnya, Masyumi muncul kembali dengan kekuatan dari PBB (Partai Bulan Bintang) yang mewakili kekuatan tua, serta kekuatan muda yang berasal dari PK dan PKS. Ini menunjukkan adanya pergeseran dinamika politik di Indonesia setelah era Soeharto, dengan munculnya partai-partai baru dan polarisasi politik yang memainkan peran penting dalam proses pemilu.⁵⁵

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki Islam sebagai dasar atau ideologi mereka yang jelas. Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak secara eksplisit menjadikan Islam sebagai dasar ideologi mereka, tetapi mengakui Islam sebagai bagian dari identitas dan simbol-simbol partai. Sejarah pendirian mereka juga erat kaitannya dengan komunitas Islam. Meskipun PAN dan PKB secara resmi menggunakan Pancasila sebagai dasar partai, mereka juga dianggap terkait erat dengan komunitas Islam atau organisasi massa Islam seperti NU dan Muhammadiyah, yang menjadi basis pemilih mereka.⁵⁶

Al-Farabi berpendapat bahwa dalam buku Sang Filsuf Muslim Pendiri *Neoplatonisme* bahwasanya masyarakat yang sempurna, semua warga negara akan hidup harmonis dalam kesetiaan terhadap pemimpin dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Namun, ia juga menyadari bahwa masyarakat yang sepenuhnya demokratis mungkin tidak mencapai kemajuan yang diinginkan, karena ada potensi konflik dan kepentingan pribadi yang dapat menghalangi pencapaian tujuan kolektif. Oleh karena itu, Al-Farabi berpandangan bahwa demokrasi harus dibatasi dan dipandu oleh pemimpin yang bijaksana. Menurutnya, pemimpin yang memiliki pengetahuan dan visi yang benar harus memimpin dan membimbing rakyat.⁵⁷

⁵⁵ Toni Andrianus Pito, Efriza, and Kemal Fasyah, *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2022), 73.

⁵⁶ Aisah Putri Budiarti, *Partai Politik Dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 204..

⁵⁷ Ulum, *Al-Farabi: Sang Filsuf Muslim Pendiri Neoplatonisme* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), 91.

Demokrasi seharusnya tidak menjadi tindakan mayoritas semata, tetapi harus dipandu oleh prinsip-prinsip etika dan kebijakan yang tepat. Dalam pandangan Al-Farabi, demokrasi yang baik adalah yang mengutamakan kebaikan umum dan mempromosikan kesetiaan terhadap nilai-nilai moral. Ia percaya bahwa demokrasi yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan kekacauan dan konflik, sementara demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dapat mencapai masyarakat yang harmonis dan adil. Pandangan Al-Farabi tentang demokrasi mencerminkan pemikiran politiknya yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan peran penting pemimpin yang bijaksana dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.⁵⁸

Ulum menilai dalam bukunya yang berjudul *Al-Farabi: Sang Filsuf Muslim Pendiri Neoplatonisme* bahwasanya demokrasi menurut pandangan Al-Farabi bukan suatu sistem yang dipermasalahkan dalam menjalankan kepemimpinan di suatu negara. etika dan moralitas menjadi junjungan utama Al-Farabi dalam melaksanakan sistem tersebut yang outputnya kelak akan memiliki kebermanfaatan untuk seluruh masyarakat. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi merupakan sarana khusus untuk mendidik orang-orang yang ingin menjadi pemimpin maupun wakil masyarakat dalam pemerintahan agar apa yang diperjuangkan masih menjunjung nilai-nilai moral dan etika. Terkhusus untuk partai yang memiliki basis Islam di mana hal ini dapat memberikan nilai tersendiri dalam melaksanakan sistem di partai.⁵⁹

B. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Akbar Dwianto pada tahun 2018 dengan judul *Konsep Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadhillah) Al-Farabi dan Relevansinya Bagi Negara Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep negara ideal perspektif Al Farabi melalui teorinya yaitu Al Madinah Al Fadilah (negara utama) apabila di kontekstualisasikan di negara Indonesia.

Kedua Skripsi yang berjudul “Partai dan Etika politik (Studi Atas Pencalonan Yansen Akun Effendi Sebagai Calon Bupati

⁵⁸ M Abdillah, *Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 135.

⁵⁹ Ulum, *Al-Farabi: Sang Filsuf Muslim Pendiri Neoplatonisme* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), 97.

Sanggau Dalam Pilkada Kabupaten Sanggau 2018)” yang ditulis oleh Muhammad Afrizal, pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan atas dasar moralitas pencalonan yang dilakukan oleh partai Golkar dan partai PKB terhadap Yansen akun Effendi di mana dia dicalonkan untuk menjadi Bupati Sanggau 2018. Dalam penelitian kali ini mengungkap bagaimana etika yang dipakai oleh kedua partai pengusung tersebut ketika mengusung mantan narapidana untuk menjadi pemimpin daerah.⁶⁰

Ketiga Jurnal yang berjudul “Pelebagaian Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022”, yang ditulis oleh Arifwendri Pratama, Andri Rusta dan Tamrin. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengupas cara deskriptif tentang peningkatan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Sumatera Barat yang dari 3 kali kontestasi memiliki tren positif dengan semakin banyaknya suara yang diperoleh. Disini peneliti melihat bahwasanya capaian tersebut bukan muncul secara tiba-tiba tetapi memiliki suatu sebab yang di mana pada kali ini penelitian ini ditujukan dan difokuskan untuk melihat bagaimana pengaruh kelembagaan partai amanat nasional terhadap perolehan suara masyarakat Sumatera Barat tahun 2019-2022.⁶¹

Keempat jurnal yang ditulis oleh Hafiz a Rafiq dan Ahmad Irawan Hamzani yang berjudul “Homo Islamicus dan Imperfectice: Konsep Manusia dan Al-Madinah Al-Fadilah menurut Al-Farabi” menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis objek. Penelitian ini mengupas bahwasanya di dalam suatu masyarakat terdapat klasifikasi tiga peringkat yang pertama Kamila uzma kemudian Kamila wista dan Kamila Sukro. Sementara masyarakat tidak sempurna menurut Al-Farabi adalah masyarakat yang belum mencapai untuk memenuhi kebutuhan fisiologi dan tidak memiliki kesepahaman terhadap masyarakat sempurna itu sendiri.

Kelima Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fajar dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Perbandingan Thomas Aquinas dan Al-Farabi dalam konsep kebahagiaan untuk membentuk negara ideal menjabarkan tentang korelasi kebahagiaan masyarakat modern yang dipengaruhi oleh sistem negara. hal ini mengacu kepada pemikiran

⁶⁰ Muhammad Aprizal: “Partai dan Etika Politik (Studi Atas Pencalonan Yansen Akun Effendy Sebagai Calon Bupati Sanggau Dalam Pilkada Kabupaten Sanggau 2018)” Skripsi (Jakarta: UIN, Sunan Kalijaga, 2019), 54.

⁶¹ Jurnal Suara Politik, “Pelebagaian Partai Amanat Nasional (Pan) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2022” 1, no. 2 (2022): 1–6.

dua tokoh filsuf dari Barat dan Timur yang terepresentasikan oleh Thomas aquinas dan Al-Farabi di mana di dalamnya mengulas bagaimana pemikiran kedua tokoh tersebut untuk membentuk negara ideal dan memiliki pengaruh terhadap kebahagiaan masyarakat yang berada di dalam negara tersebut.⁶²

Persamaan penelitian dari ke-lima penelitian terdahulu yang saya lakukan dalam karya ini mengupas tentang etika sebagai objek formal dan Partai Amanat Nasional sebagai objek material. Selain itu, persamaan lainnya juga terdapat pada bagian yang memiliki fokus terhadap etika politik yang dijadikan landasan dan objek Partai Amanat Nasional.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti akan lakukan sekarang merupakan konteks yang digunakan lebih spesifik. Jadi Al-Farabi melalui pemikirannya tentang etika politik di korelasikan dengan konteks Partai Amanat Nasional. Dari penelitian yang peneliti lakukan dapat memberikan sejauh mana korelasi etika Partai Amanat Nasional terhadap etika politik perspektif Al-Farabi, maka parameter yang digunakan dapat berupa kesamaan maupun perbedaan.

Berdasarkan penelitian ini etika politik yang dirumuskan oleh Al-Farabi melalui kitabnya yaitu Al-Madinah Al-Fadilah digunakan oleh Partai Amanat Nasional yang termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kemudian teraktualisasi melalui kader-kadernya. Dari hal tersebut, dapat kita jadikan penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang di mana penelitian ini secara spesifik melihat salah satu etika politik lembaga politik yang ada di Indonesia dengan menggunakan pandangan etika politik Al-Farabi.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah cara di mana seorang peneliti menyusun teori-teori dan pemikiran yang ada berdasarkan studi literatur yang relevan. Kerangka berpikir ini memiliki beberapa kegunaan, seperti mengembangkan *hipotesis* penelitian, menjelaskan model penelitian yang akan dilakukan, atau menguraikan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Namun, terkadang kerangka berpikir tidak konsisten, hanya didasarkan pada

⁶² Muhamad Fajar Pramono et al., “Analisis Perbandingan Thomas Aquinas dan Al-Farabi Dalam Konsep Kebahagiaan Untuk Membentuk Negara Ideal A Comparative Analysis Thomas Aquinas And Al-Farabi on Concept of Happiness in Forming an Ideal State” 5, no. 1 (2024): 71–84.

satu atau dua tinjauan literatur saja. Kerangka berpikir ini merupakan dasar penting dalam membuat penelitian yang kredibel dan valid.⁶³

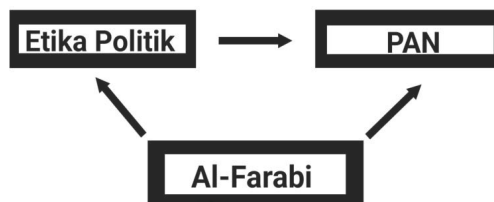
Kerangka berpikir studi kepustakaan, peneliti perlu melakukan kajian teoretis yang menyelidiki informasi seputar permasalahan penelitian yang ingin dipecahkan melalui penelitian. Kajian teoretis ini melibatkan pencarian literatur terkait dan menggali pemahaman yang sudah ada dalam bidang tersebut. Pada tahap ini, peneliti dapat mengidentifikasi teori-teori yang relevan, konsep-konsep yang berkaitan, atau pendekatan yang sudah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Dengan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, peneliti dapat merumuskan *hipotesis* atau pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian tersebut. Selain itu, kerangka berpikir juga dapat membantu peneliti menjelaskan tujuan penelitian, konteks *teoritis* yang menjadi landasan penelitian, dan metode penelitian yang akan digunakan. Dengan menggunakan kerangka berpikir, peneliti dapat menyusun argumentasi yang kuat untuk menghubungkan informasi literatur dengan fokus penelitian yang ditentukan. Kerangka berpikir studi kepustakaan juga dapat memberikan panduan bagi peneliti dalam mengorganisasikan data dan memetakan hubungan antara variabel-variabel yang terlibat. Hal ini dapat membantu peneliti dalam melakukan analisis data yang lebih terarah dan menghasilkan temuan yang lebih valid dan *reliabel*.⁶⁴

Penelitian kali ini memiliki beberapa unsur, jika mengacu kepada kerangka berpikir di kepustakaan maka terdapat beberapa variabel dalam penelitian ini. Pertama, objek formal dalam penelitian adalah etika politik. Sementara untuk objek materialnya adalah Partai Amanat Nasional, untuk konteksnya itu adalah perspektif Al-Farabi. Jadi ketika unsur tersebut akan selalu beriringan dan terikat antara satu sama lain untuk menjadi acuan berpikir dalam melihat penelitian kali ini. Berikut gambaran jika kerangka berpikir penelitian kali ini di ringkas melalui gambar berikut:

⁶³ Arie Pratama, *Penulisan Ilmiah Implementasi Pada Ilmu Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022), 60.

⁶⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 49.

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir Etika Politik Partai Amanat Nasional Perspektif Al-Farabi



Konteks kerangka berpikir kali ini, Al-Farabi digunakan sebagai perangkat pembatas untuk mendasarkan pemahaman tentang bagaimana etika politik didefinisikan. Pendapat Al-Farabi juga menjadi sudut pandang yang penting dalam menganalisis bagaimana Partai Amanat Nasional berperan sebagai lembaga yang menjadi pilar demokrasi. Dengan menggunakan perspektif etika politik Al-Farabi, kita dapat melihat dan memeriksa etika Partai Amanat Nasional secara lebih *komprehensif*.

Chatti and Hodges, dalam karyanya Al-Farabi, Syllogism: An Abridgement of Aristotle's Prior Analytics, Ancient Commentators on Aristotles menerangkan. Etika politik sebagai bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sistem politik. Menurutnya, tujuan pemerintahan adalah menciptakan masyarakat yang adil. Ia meyakini bahwa pemimpin yang bertindak dengan integritas dan moral yang tinggi dapat membentuk masyarakat yang harmonis. Al-Farabi juga menegaskan pentingnya kearifan dan bijaksana dalam mengambil keputusan politik, serta perlunya pendidikan yang baik agar individu dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas. Selain itu, Al-Farabi juga menekankan pentingnya kerjasama sosial dalam etika politik. Baginya, sebuah negara dapat mencapai kemajuan dan kebahagiaan jika semua anggotanya saling bekerja sama. Kehidupan politik yang baik harus didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan menghormati hak asasi manusia. Al-Farabi berpendapat bahwa pemimpin yang bijaksana harus mampu menjaga kestabilan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan antarindividu dalam masyarakat.⁶⁵

Pandangan Al-Farabi tentang etika politik dalam karya Abdillah yang berjudul, *Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* mencerminkan tradisi pemikiran Islam yang kuat mengenai nilai-nilai moral dan keadilan dalam kepemimpinan politik. Kontribusinya yang

⁶⁵ Chatti and Hodges, *Al-Farabi, Syllogism: An Abridgement of Aristotle's Prior Analytics, Ancient Commentators on Aristotle* (London: Bloomsbury Publishing, 2020), 132.

mendalam dan *komprehensif* dalam bidang ini menjadikan ia sebagai salah satu tokoh penting yang layak dipelajari. Melalui pemahaman dan pengaplikasian pemikiran Al-Farabi, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik dalam merumuskan etika politik yang memadukan prinsip-prinsip agama dengan tuntutan kehidupan politik modern. Al-Farabi mengemukakan bahwa sebuah negara ideal adalah negara yang diatur oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan adil, serta mampu menciptakan kehidupan yang harmonis bagi seluruh warganya. Dalam konteks Indonesia, dengan sistem demokrasi sebagai landasan struktur politiknya, keadilan sosial dapat tercapai melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik.⁶⁶

Negara Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim juga memiliki pertalian kuat dengan nilai-nilai Islam. Konsep *hablum minannas* dalam Islam menekankan pentingnya menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antar-individu dalam masyarakat.⁶⁷ Hal ini sejalan dengan konsepsi Al-Farabi tentang keharmonisan sosial yang dibangun melalui prinsip dasar bernegara dan beretika politik. Dengan demikian, melalui penerapan prinsip dasar yang digagas oleh Al-Farabi dan pengintegrasian nilai-nilai Islam yang terkandung dalam undang-undang dasar dan Pancasila, Indonesia dapat mencapai landasan negara yang memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.⁶⁸ Penting bagi kita untuk memahami pemikiran Al-Farabi dan menerapkannya secara bijaksana dalam konteks politik Indonesia, sehingga kita dapat membangun negara yang adil, harmonis, dan beretika sesuai dengan visi Al-Farabi tentang negara ideal.

⁶⁶ Abdillah, *Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 64.

⁶⁷ Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2017), 43.

⁶⁸ Arif, *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi* (Semarang: PT Elex Media Komputindo, 2018), 83.